

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alwasilah, A. 2012. *Pokoknya Kualitatif*. Bandung, PT Dunia Pustaka Jaya.
- Arikunto, S. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta, 89-71.
- Makmur, 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta, Prenadamedia Groub.
- Salim, A. 2006. *Teori dan Paradigma Sosial*. Yogyakarta, Tiarawacana.
- Setyadiharja, R. 2017. *E-procurement (Dinamika Pengadaan Barang/ Jasa Elektronik)*. Sleman, CV BUDI UTAMA.
- Suryabrata, S. 2000. *Metode penelitian*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. 2016. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal, Skripsi dan Tesis:

- Alam, A. S. (2012). Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 78-92.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Arsyad, M., & Anam, S. (2016). Analisis pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada LPSE kota Kendari. *Jurnal ekonomi UHO*, 1(1).
- Dasim, S. M. (2012). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sains Di Sekolah Dasar: Studi Tentang Kompetensi Guru di SDN Sukagalih 1 dan 6 Kota Bandung (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Hadiyanti, R. (2013). Implementasi peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 1.

- Kholis, M. (2006). Efektivitas dan evesiensi e-procurement studi deskriptif tentang efektifitas dan efisiensi program lelang pengadaan barang/jasa pemerintah secara online (e-procurement) di Pemerintah Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Lestanata, Y., & Pribadi, U. (2017). Efektivitas pelaksanaan program pembangunan berbasis rukun tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014–2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), 368-389.
- Muhtar, T. (2012). Implementasi Pengadaan Secara Elektronik (e-Procument) di LPSE Provinsi Sulawesi Tengah. *Journal teknik sipil daninfrastruktur*, 1(1).
- Ningrum. N. A. M. Kajian 7 Prinsip dan 8 (Delapan) Etika Pengadaan Barang/Jasa Pada Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Kulon Progo, (Online). (<http://etd.repository.ugm.ac.id>, diakses 9 Oktober 2017).
- Nurchana, A. R. A. (2014). Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 355-359.
- Nurmandi, A. (2013). What Is The Status Of Indonesia's E-Procurement?. *Jurnal Studi Pemerintahan: Journal of Government and Politics*, 4(2).
- Nurmandi, A., & Kim, S. (2015). Making e-procurement work in a decentralized procurement system: A comparison of three Indonesian cities. *International Journal of Public Sector Management*, 28(3), 198-220.
- Rahayu, T. P. (2013). Implementasi kebijakan e-procurement untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 290-298.
- Rokhmana, S. N. (2012) Analisis Pengaruh Resiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang). Skripsi, IAIN Walisongo.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Sakir. (2014). Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Thesis: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sartika, D., & Yuliani, F. (2014). Implementasi e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 199-122.
- Susilawaty, S. (2007). Analisis Kebijakan Publik Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Kota Tasikmalaya (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Udoyono, K. (2012). E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di kota yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan: Journal of Government and Politics*, 3(1).

Wahyuningsih, S. E. (2016). Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada kantor badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*.

Widjaja, H. A. E. (2009). Implementasi E-Procurement pada Rumah Sakit (Doctoral dissertation, Tesis Jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah).

Wijaya, N. P. N. (2011). Analisa Pengukuran Efektivitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Instansi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Yuwinanto, H. P. (2013). Implementasi e-procurement pada pemerintah kota Surabaya. *Jejaring administrasi publik*.

Perundang- undangan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

Website:

<https://report-lpse.kulonprogokab.go.id/>, diakses pada hari Sabtu, 7 Oktober 2017 pukul 22.22 WIB.

<http://setda.kulonprogokab.go.id/pages-68-kegiatan.html>, diakses pada hari Rabu, 11 Oktober 2017 pukul 13.29 WIB.

<http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/393>, diakses pada hari Rabu, 11 Oktober 2017 pukul 14.01 WIB.

<http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3>, diakses pada hari Jumat 13 Oktober 2017 pukul 13.42 WIB.

<https://yogyakarta.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/29>, diakses pada hari Rabu, 18 Oktober 2017 pukul 23.10 WIB.

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Kondisi-Umum_6_hal, diakses pada hari Selasa, 31 Oktober 2017 pukul 12.30 WIB.

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Sejarah_7_hal, diakses pada hari Selasa, 31 Oktober 2017 pukul 12. 50 WIB.

<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/834/Profil-Kabupaten-Kulonprogo>, diakses pada hari Selasa, 31 Oktober 2017 pukul 13.43 WIB.

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/visi-misi_4_hal, diakses pada hari Minggu, 12 November 2017 pukul 22.28 WIB.

http://data.dukcapil.kulonprogokab.go.id/data/jenis_kelamin#, diakses pada hari Rabu, 29 November 2017 pukul 20.42 WIB.

<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/834/Profil-Kabupaten-Kulonprogo>, diakses pada hari Sabtu, 16 Desember 2017 pukul 18.51 WIB.

http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/Modul_Pengantar_PBJP_1-10.pdf, diakses pada hari Sabtu, 16 Desember 2017 pukul 19.30 wib.

Wawancara:

Cahyono. (13 November 2017). Efektivitas *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017.

Eratra (17 November 2017). Efektivitas *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017.

Putri (18 Desember 2017). Pelayanan LPSE dan ULP Kabupaten Kulon Progo pada penyedia barang/jasa pemerintah.

Fatonah (18 Desember 2017). Pelayanan LPSE dan ULP Kabupaten Kulon Progo pada penyedia barang/jasa pemerintah.